

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung

I Nyoman Mahardhika^{1)*}, Ni Putu Tirka Widanti²⁾, Ida Ayu Putu Sri Widnyani³⁾, Sayang Bidul⁴⁾

^{1)*} mahardhikanyoman@gmail.com

¹⁾ Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia

²⁾ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Bantul, Yogyakarta, Indonesia

Jejak Artikel:

ABSTRACT

Upload: 13 Oktober 2024
Revisi: 16 Oktober 2024
Diterima: 01 Desember 2024
Tersedia online: 10 Desember 2024

Kata Kunci:

Capital;
Economy;
Government policy;
Gross regional domestic product;
MSME development;

As the backbone of a country's economy, micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are essential to supporting national economic growth. The Badung Regency Government has launched various policies and programs to support the development of MSMEs. However, the effectiveness of these policies needs to be evaluated to ensure that the programs implemented have a positive impact on the MSMEs' development in Badung. This normative research uses a qualitative approach and evaluative analysis to evaluate the effectiveness of policies, with findings indicating that MSME Development in Badung Regency has a vital role in supporting local economic growth. The evaluation of government policies concludes that government policies have a significant role in supporting the development of MSMEs in Badung Regency. Well-designed policies have been shown to improve MSME performance, positively impact local economic growth, and encourage MSME contributions to gross domestic product (GDP). Implementing policies such as providing capital assistance, developing business incubators, and increasing market access are critical factors in creating a conducive business climate. However, there are some significant obstacles to the implementation of the policy. Lack of understanding of MSMEs about government programs, limited access to financial technology, and the quality of financial services are obstacles to accessing capital.

PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara (Hadi Putra & Santoso, 2020), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Suminah, Suwanto, Sugihardjo, Anantanyu, & Padmaningrum,

* Corresponding author

2022; Utami, Santosa, & Vidya Leila, 2021), khususnya di Indonesia, mencakup lebih dari 97% (Rahmadani & Subroto, 2022) dari total tenaga kerja dan 99% dari semua perusahaan di Indonesia (Burger et al., 2015). Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan perlindungan dan kemudahan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan, teknologi, informasi, serta pemasaran bagi UMKM. UMKM sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, menyumbang lebih dari 90% perusahaan di luar sektor pertanian. UMKM dianggap sebagai motor penggerak utama perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memfasilitasi pemerataan ekonomi di tingkat local (Shettima, 2021). Di Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali, sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun, seperti halnya UMKM di daerah lain, pelaku UMKM di Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka. Beberapa tantangan tersebut termasuk keterbatasan akses terhadap permodalan, kesulitan dalam adopsi teknologi, keterbatasan kapasitas manajerial, hingga kurangnya akses pasar yang lebih luas. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan kendala keuangan yang seringkali membatasi ruang gerak UMKM dalam berinovasi dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berperan penting dalam memberikan stimulus ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Berbagai Tantangan ini semakin diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, yang membuat banyak UMKM di Badung mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa menghentikan operasinya (Tshishonga & Sebake, 2024).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan. Pada Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 2013 ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan: a. Pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan pengembangan usaha terhadap UMKM.

Pemerintah Kabupaten Badung telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti penyediaan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat, pelatihan keterampilan, fasilitasi sertifikasi produk, hingga promosi di pasar digital. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendukung keberlanjutan usaha mereka (Huseynova, 2024a). Meskipun demikian, efektivitas dari berbagai kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar berdampak positif terhadap pengembangan UMKM di Badung.

Penelitian tentang kebijakan pengembangan UMKM memang telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus di kota-kota di pulau Jawa semata seperti di Tasikmalaya (Mutiara Rakista & Anggi Permata Karismatika, 2024), Tegal (Latifah & Muradi, 2024), serta di kota-kota besar di Jawa lainnya seperti Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya (Tyas, Sianturi, & H, 2020). Sedangkan penelitian ini justru berfokus pada suatu kabupaten di salah satu pulau Bali yaitu di Kabupaten Badung. Tidak hanya itu, penelitian lain yang ada sebelumnya juga hanya berfokus pada meneliti analisis perbandingan (Tyas et al., 2020), Implementasi (Fahrezi, Rifai, & Argenti, 2022) dan strategi pengembangan

(Iman Kalis, Hendri, & Safitri, 2023; T. S. Tambunan, 2023) semata. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengevaluasian terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM di daerah Kabupaten Badung.

Penelitian ini penting karena Evaluasi ini penting dilakukan agar Pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, sekaligus mengetahui apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM di Badung (Jili & Nzimakwe, 2022). Selain itu, evaluasi ini juga akan melihat sejauh mana kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (T. T. H. Tambunan, 2023). Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apakah Kebijakan Pemerintah memiliki dampak pada UMKM di Kabupaten Badung? Serta apa saja yang menjadi hambatan dan staretgis utama dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung?

Dengan demikian, hasil evaluasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah di masa depan, baik di tingkat lokal maupun nasional (Singla, 2023). Peningkatan kinerja UMKM melalui kebijakan yang tepat diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Badung.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum, kebijakan, serta regulasi yang berlaku terkait pengembangan UMKM, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada sumber data sekunder dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, terkait UMKM serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur terkait kebijakan UMKM, analisis dokumen resmi dari pemerintah, serta kajian terhadap publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi sumber data dilakukan dengan kriteria keterkaitan langsung dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung, kekinian sumber data, serta otoritas lembaga yang menerbitkannya.

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan analisis evaluatif. Analisis evaluatif dilakukan dengan cara membandingkan kebijakan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut efektif dalam mendorong pengembangan UMKM. Dari hasil evaluasi ini, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

HASIL DAN DISKUSI

Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Kabupaten Badung

Penelitian ini menemukan bahwasanya kebijakan pemerintah memiliki dampak yang positif langsung terhadap kinerja perusahaan UMKM. Sehingga implikasinya adalah Semakin

berkualitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan UMKM, akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan UMKM. Hasil penelitian ini tentu mendukung hasil dari penelitian sebelumnya (Charismanur Anggraeni, Puspita Ningtiyas, & Mufidatul Alimah, 2021; Natasya & Hardiningsih, 2021; Sombolayuk, 2023). Berkaitan dengan hasil tersebut, ... (Kraja, Osmani, & Molla, 2014) menjelaskan bahwasanya melalui kebijakan, Pemerintah dapat mengubah dan memperbaiki kondisi UKM. Kebijakan tersebut dapat membantu UKM meningkatkan kinerjanya dan menjaga kelangsungan usahanya (Sedana & Andriani, 2022).

Tidak diragukan lagi bahwasanya UMKM memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia (Widita, Lechner, & Widyastuti, 2024). Bahkan (Surya et al., 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya UMKM yang sedang berkembang akan menyumbang 60% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dan dikarenakan UMKM sangat penting bagi pembangunan PDB di Indonesia (Tarihoran, Hubeis, Jahroh, & Zulfainarni, 2023), maka tentu Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan dan mendukungnya melalui kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap UMKM (Harini, 2016).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah (Maharani & Nurlukman, 2023), Di antaranya adalah “UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” (Sombolayuk, 2023).

Bukan hanya skala Nasional, Di Kabupaten Badung sendiri telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar, Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor : 04/Diskop.UKMP/2024 Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*).

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka seharusnya itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap UMKM, khususnya di Kabupaten Badung. Sebuah penelitian lapangan telah mengungkapkan bahwasanya kinerja UMKM se Kecamatan Badung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dimana semakin baik penerapan kebijakan pemerintah terhadap UMKM maka semakin meningkat pula kinerja UMKM (Kusuma Sari, 2024). Terlebih lagi apabila ada kebijakan Pemerintah memberikan bantuan modal/uang berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya akan mengarah kepada kesejahteraan (Budhi, Lestari, & Suasih, 2021). Hal ini terbukti dimana dalam penelitian (Budhi et al., 2021) diungkapkan bahwasanya dengan adanya bantuan hibah uang terutama bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Badung mampu meningkatkan produksi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Apalagi saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Badung telah membuat Lembaga Inkubator Bisnis yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan inkubasi, menciptakan usaha baru, memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan, serta meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi. Selain itu,

lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar memiliki nilai ekonomis dan daya saing tinggi. Lembaga ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang terteta dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Dan hingga saat ini, telah banyak UMKM yang berkembang di Badung, Bali. Khususnya setelah Pandemi COVID-19, (Sujana, Pramana, & Apriani, 2023) mengungkapkan bahwasanya Saat sektor pariwisata mati suri di masa pandemi, muncul usaha-usaha baru berbentuk UMKM di Kabupaten Badung.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan ada dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UMKM, di sisi lain penelitian lain justru mengungkapkan hal sebaliknya, dimana kebijakan pemerintah justru belum menunjukkan dampak signifikan langsung terhadap UMKM di Badung, khususnya pada kesejahteraan pengrajin di Badung, menunjukkan perlunya program dukungan yang ditingkatkan (Wijaya & Utama, 2017).

Stretegi dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung merupakan salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Model pemberdayaan UMKM di berbagai daerah mencakup faktor eksternal seperti peran pemerintah, BUMN/Swasta, Lembaga Keuangan Non-Bank/Koperasi/LSM, dan perguruan tinggi. Aspek internal seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia juga perlu diperkuat (Ritonga & Dewi, 2023).

Strategi pengembangan UMKM meliputi kemudahan akses pasar dan permodalan (Anatan & Nur, 2023), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan iklim investasi melalui promosi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan kelembagaan (Rauf, Prayuda, & Munaf, 2023a). Pengembangan UMKM melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal meliputi upaya inovasi produksi, pengadaan modal, perluasan jaringan pemasaran, dan pengadaan sarana dan prasarana produksi. Pengembangan eksternal dilakukan dengan bantuan instansi terkait, pemerintah, dan asosiasi UMKM (Widodo, Wahyuni, Zulianto, & Islami, 2019).

Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan, serta berbagai strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Hambatan Utama dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung. Berdasarkan kajian literatur dan penelitian yang ada, beberapa hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Badung meliputi:

Ketidakstabilan harga bahan baku: fluktuasi harga bahan baku menjadi tantangan yang besar bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor produksi. Hal ini memengaruhi biaya produksi dan secara langsung berdampak pada margin keuntungan. Stabilitas harga bahan baku diperlukan agar UMKM dapat menjaga kelangsungan usaha mereka (Widodo et al., 2019).

Kualitas SDM yang terbatas: keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan manajerial merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh UMKM di Badung. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, yang membuat mereka kesulitan dalam bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional.

Modal yang terbatas: akses terhadap modal masih menjadi masalah klasik dalam pengembangan UMKM. Meskipun terdapat berbagai program permodalan yang disediakan oleh

pemerintah, banyak UMKM yang belum bisa mengakses dana tersebut karena berbagai alasan, termasuk rendahnya literasi keuangan dan persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi (Habiburahman, Alam, Dunan, & Haninun, 2019a).

Keterbatasan akses dan sosialisasi: Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah secara positif mempengaruhi pertumbuhan UMKM, tantangan seperti akses terbatas di daerah terpencil dan sosialisasi kebijakan yang tidak mencukupi (Warsiyah, Saputeri, Nurulia, & Fakhrurozi, 2024).

Strategi Efektif untuk Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sejumlah strategi telah diimplementasikan, baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta. Strategi-strategi tersebut antara lain:

Inovasi dalam produksi UMKM didorong untuk terus berinovasi dalam proses produksi, baik dengan mengadopsi teknologi baru maupun mengembangkan produk-produk kreatif yang dapat bersaing di pasar lokal dan global. Program pelatihan dan pendampingan dari pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Pengadaan modal dan akses kredit Pemerintah melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berupaya mempermudah akses UMKM terhadap permodalan. Program ini juga didukung oleh pemberian bunga yang rendah untuk membantu UMKM bertahan dan tumbuh, terutama di tengah tantangan ekonomi.

Perluasan jaringan pemasaran Salah satu upaya penting adalah memperluas akses pasar bagi UMKM, baik melalui promosi produk secara langsung maupun dengan memanfaatkan platform digital. Inisiatif e-commerce dan program pemasaran digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penjualan UMKM di era digital (Rauf, Prayuda, & Munaf, 2023b).

Peningkatan sarana dan prasarana Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM menjadi prioritas, seperti pengembangan sentra-sentra UMKM, pusat pelatihan, dan fasilitas teknologi. Infrastruktur yang baik membantu UMKM untuk beroperasi dengan lebih efisien dan berdaya saing.

Dampak Ekonomi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi lokal. UMKM berperan sebagai penggerak dinamika ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM juga memberikan sumbangan dalam bentuk devisa negara melalui peningkatan ekspor produk-produk local (Habiburahman, Alam, Dunan, & Haninun, 2019b).

Tantangan dan peluang terkait korupsi, hambatan regulasi dalam berbisnis, inovasi lingkungan bisnis, dan pengembangan kelembagaan dan kebijakan terhadap pengembangan UMKM telah dianalisis di negara-negara Asia Tengah-Barat (Huseynova, 2024b). Indeks MSME-MBF diusulkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pertumbuhan unit manufaktur MSME di berbagai negara bagian, memberikan wawasan mengenai kinerja MSME di berbagai wilayah.

Strategi pengembangan UMKM di berbagai daerah telah berhasil menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan karakteristik daya tarik utama, menjaga daya saing, dan meningkatkan layanan pariwisata daerah (Latianingsih, Mariam, Rudatin, Usmanij, & Ratten, 2022). Proyek pengembangan inkubator bisnis UMKM di Kabupaten Toba dinilai memiliki potensi besar dan

kelayakan investasi yang baik, memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dalam hal fasilitasi, pelatihan, dan akses pasar (Rizkita, Sitorus, Khairunnisa, Alamsyah, & Abdurohman, 2023).

Faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi pengembangan UMKM (Latita, Ramadhanti, Larasati, & Lituhayu, 2023) Meskipun belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian yang ada, faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM di Badung. Salah satu aspek penting adalah budaya kewirausahaan yang perlu terus dikembangkan, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan bisnis modern.

KESIMPULAN

Pengembangan UMKM di Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Evaluasi kebijakan pemerintah menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Kebijakan yang dirancang dengan baik terbukti mampu meningkatkan kinerja UMKM, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB). Implementasi kebijakan seperti pemberian bantuan modal, pengembangan inkubator bisnis, dan peningkatan akses pasar menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya pemahaman UMKM tentang program pemerintah, akses terbatas terhadap teknologi keuangan, dan kualitas layanan keuangan menjadi kendala dalam akses modal. Selain itu, UMKM di Kabupaten Badung juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia yang kurang terlatih, ketidakstabilan harga bahan baku, serta kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan strategi inovatif seperti pelatihan SDM, penguatan jaringan pemasaran, stabilisasi harga bahan baku, dan peningkatan infrastruktur UMKM. UMKM di Kabupaten Badung tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, seperti yang ditunjukkan oleh kontribusi UMKM terhadap PDB. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan pemerintah yang pro-UMKM menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dampak perubahan sosial-budaya.

REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan solusi inovatif berbasis teknologi yang relevan untuk pengembangan UMKM, serta berkontribusi pada literatur terkait kebijakan UMKM melalui perspektif baru dalam inovasi kebijakan berbasis teknologi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup wilayah Kabupaten Badung dan menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian di masa mendatang dengan metode dan pendekatan yang berbeda tentu diperlukan untuk generalisasi hasil dan analisis lebih mendalam terhadap kebijakan pengembangan UMKM di berbagai wilayah lainnya.

REFERENSI

- Anatan, L., & Nur. (2023). Micro, Small, and Medium Enterprises' Readiness for Digital Transformation in Indonesia. *Economies*, 11(6), 156. <https://doi.org/10.3390/economies11060156>
- Budhi, M. K. S., Lestari, N. P. N. E., & Suasih, N. N. R. (2021). DAMPAK HIBAH UANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(3), 255–264. <https://doi.org/10.53625/JIRK.V1I3.195>
- Burger, N., Chazali, C., Gaduh, A., Rothenber, A. D., Tjandraningsih, I., & Weilant, S. (2015). *Reforming policies for small and medium-sized enterprises in Indonesia*. Jakarta Pusat: TNP2K.
- Charismanur Anggraeni, W., Puspita Ningtiyas, W., & Mufidatul Alimah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.31764/JGOP.V3I1.5354>
- Fahrezi, F., Rifai, M., & Argenti, G. (2022). Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4008–4012. <https://doi.org/10.31316/JK.V6I2.3627>
- Habiburahman, Alam, I. A., Dunan, H., & Haninun. (2019a). MSMEs empowerment and development strategy model. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(12), 34 – 39. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I12/20193209>
- Habiburahman, Alam, I. A., Dunan, H., & Haninun. (2019b). MSMEs empowerment and development strategy model. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(12), 34 – 39. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I12/20193209>
- Hadi Putra, P. O., & Santoso, H. B. (2020). Contextual factors and performance impact of e-business use in Indonesian small and medium enterprises (SMEs). *Heliyon*, 6(3), e03568. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03568>
- Harini, S. (2016). ANALYSIS OF EFFECTS OF GOVERNMENT POLICY AND THE INVOLVEMENT OF STAKEHOLDERS ON THE PERFORMANCE OF MSME. *Journal of Management and Business*, 15(1). <https://doi.org/10.24123/jmb.v15i1.4>
- Huseynova, L. (2024a). Challenges and opportunities in the development of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Central and West Asia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 527 – 538. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.41](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.41)
- Huseynova, L. (2024b). Challenges and opportunities in the development of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Central and West Asia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 527 – 538. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.41](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.41)
- Iman Kalis, M. C., Hendri, M. I., & Safitri, H. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mendukung Perekonomian Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *MBIA*, 22(2), 230–244. <https://doi.org/10.33557/mbia.v22i2.2384>
- Jili, N. N., & Nzimakwe, T. I. (2022). The implementation and sustainability of pro-poor local economic development initiatives in King Cetshwayo District municipality. *Journal of Public Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2424>
- Kraja, Y. B., Osmani, E., & Molla, F. (2014). The Role of the Government Policy for Support the SME-s. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n2p391>

- Kusuma Sari, I. A. B. P. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UMKM Se - Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 26–38. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i3.5805>
- Latianingsih, N., Mariam, I., Rudatin, C. L., Usmanij, P., & Ratten, V. (2022). Aligning Strategic MSME Entrepreneurship to Local Government Policy: A Case Study of a Tourism Village in Bogor Indonesia. *Contributions to Management Science*, 21 – 33. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87112-3_3
- Latifah, N., & Muradi. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022 : Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605. <https://doi.org/10.52423/NEORES.V5I2.211>
- Latita, A., Ramadhanti, A., Larasati, E., & Lituhayu, D. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 166–177. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V12I3.39806>
- Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM MELALUI SOSIAL MEDIA DAN E-COMMERCE DI KOTA TANGERANG. *Sebatik*, 27(1), 333–343. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2160>
- Mutiara Rakista, P., & Anggi Permata Karismatika. (2024). Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Pada Pelaksana UMKM di Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 103–112. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.363>
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Rahmadani, R. D., & Subroto, W. T. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(2), 167–181. <https://doi.org/10.26740/jpap.v10n2.p167-181>
- Rauf, R., Prayuda, R., & Munaf, Y. (2023a). Model of Government Development for MSMEs Through One Village One Product (OVOP) Concept by the Cooperatives and MSMEs Office in Rokan Hilir Regency. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 635 – 640. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180234>
- Rauf, R., Prayuda, R., & Munaf, Y. (2023b). Model of Government Development for MSMEs Through One Village One Product (OVOP) Concept by the Cooperatives and MSMEs Office in Rokan Hilir Regency. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 635 – 640. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180234>
- Ritonga, M. P., & Dewi, K. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1(4), 10–19. <https://doi.org/10.61132/JEPI.V1I4.307>
- Rizkita, M. Z., Sitorus, P. M., Khairunnisa, Alamsyah, A., & Abdurohman, M. (2023). FEASIBILITY STUDY AND THE DEVELOPMENT OF MSME BUSINESS INCUBATOR MOCKUP IN TOBA DISTRICT; [ESTUDO DE VIABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE MSME INCUBADORA MOCKUP NO DISTRITO DE TOBA]. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.775>
- Sedana, Y. I. M., & Andriani, P. I. G. A. M. A. M. (2022). THE ANALYSIS OF THE GOVERNMENT’S ROLE TOWARD BUSINESS SUSTAINABILITY AND WELFARE

- OF SILVERSMITH IN GIANYAR REGENCY, INDONESIA. *Eurasia: Economics & Business*, 8(62), 151–160.
- Shettima, M. B. (2021). Sustainability of micro, small and medium enterprise policies in Nigeria. *International Journal of Business and Globalisation*, 27(4), 478 – 491. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2021.113803>
- Singla, M. (2023). MSMEs: The Growth Engine of India to Achieve Sustainable Development Goals and Self-Reliance. *Sustainable Development Goals Series, Part F2800*, 73 – 87. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4829-1_4
- Sombolayuk, W. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN UKM. *SIMAK*, 21(01), 37–55. <https://doi.org/10.35129/simak.v21i01.401>
- Sujana, K. H. A. A., Pramana, G. I., & Apriani, K. D. (2023). UMKM MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG PASCA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 1–7.
- Suminah, S., Suwanto, S., Sugihardjo, S., Anantanyu, S., & Padmaningrum, D. (2022). Determinants of micro, small, and medium-scale enterprise performers' income during the Covid-19 pandemic era. *Heliyon*, 8(7), e09875. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09875>
- Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>
- Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.51622/jbm.v1i2.1990>
- Tambunan, T. T. H. (2023). The Potential Role of MSMEs in Achieving SDGs in Indonesia. *Sustainable Development Goals Series, Part F2800*, 39 – 72. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4829-1_3
- Tarihoran, A. D. B., Hubeis, M., Jahroh, S., & Zulfainarni, N. (2023). Market-based dynamic capabilities for MSMEs: Evidence from Indonesia's ornamental fish industry. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100123. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100123>
- Tshishonga, N. S., & Sebake, B. K. (2024). A critical appraisal on the impact maximization of integrated service delivery through district development model. In *Exploring Effective Municipal Planning and Implementation*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3617-5.ch010>
- Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H, J. K. P. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS RUMAH (HOME-BASED ENTERPRISES/HBE) DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, BOYOLALI, SALATIGA, DAN SURABAYA. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>
- Utami, I. D., Santosa, I., & Vidya Leila, M. R. (2021). Priority resilience strategy for micro, small, and medium enterprises for dealing with natural disasters. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55, 102074. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102074>
- Warsiyah, Saputeri, N. P., Nurulia, E. T., & Fakhurozi, Moh. (2024). Evaluation of the Effectiveness of Government Policy on MSMEs Through Empirical Data Analysis in Lampung. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16272>

- Widita, A. A., Lechner, A. M., & Widyastuti, D. T. (2024). Spatial patterns and drivers of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) within and across Indonesian cities: Evidence from highly granular data. *Regional Science Policy & Practice*, 16(11), 100137. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100137>
- Widodo, J., Wahyuni, S., Zulianto, M., & Islami, N. N. (2019). The Analysis of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) development through external facilitation and internal potential on former workers of Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT. HM Sampoerna Jember. In S. null (Ed.), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 243). Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012092>
- Wijaya, I. G., & Utama, I. M. S. (2017). The Effects of Government Policy on Craftsmen Welfare in Badung Regency of Bali Province; Mediating Social Infrastructure, Entrepreneurship, and Competitive Resources. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 08(02), 07–15. <https://doi.org/10.9790/5933-0802030715>